

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng, *Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah*, Jakarta, Visi Media, 2015.
- Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Slawi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, 2000.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian, *Memperkokoh Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Mahendra, A.A Oka, "Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah", www.legalitas.org.
- Matthew B. Miles dan Michel Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Jakarta, 1980.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1982.
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara: Sebuah Pengantar*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).
- Ismail Suny "Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Hukum Jangka Panjang", Makalah dalam buku *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, UII, 1992).

- Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Bandung, Bandung, 1999).
- Dalizar Putra, Hak Asasi Manusia menurut Al-Quran, Jakarta, PT Al-Husna Zikra, 1955.
- Muhamad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ,Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Jakarta, 2003.
- Bomer Pasaribu, “*Upaya Penataan Kembali State Auxiliary Bodies Melalui Peraturan Perundang-undangan* “ Makalah dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN Departemen Hukum & HAM RI, Nomor I Tahun 2008.
- D. Mutiara, *Ilmu Hukum Tata Negara Lengkap*, Jakarta ,Pustaka Islam , 1975, hlm. 20.
- Nuktoh Arfani Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, , 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian, Memperkokoh Otonomi Daerah, Yogyakarta, UII Press, 2004,
- Muh. Kusnadi dan Bintang R Saragih, Ilmu Negara, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cetakan keempat, , 2000.
- Kartono, Kartini, Pengantar Metode Riset Sosial, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Miles, Mattew B. dan Michel Huberman Miles, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1992.
- Biro Data, Perencanaan dan KLN Kementerian Komunikasi dan Informasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 2005.

Jurnal

Jawade hafidz, mengukur kinerja reformasi hukum birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam [ejournal. undip.ac.id/index. php/mmh /article/download/9029/7334](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/9029/7334).

LKPP, Senerai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Jurnal Pengadaan, Vol. 1 No. I., LKPP, Jakarta, 2011.

Modul

Tim Penyusun Modul Pelatihan Pengadaan barang dan jasa , Supply Chain Management, LKPP, 2015.

Majalah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majalah Kredibel, Edisi 1, Berkaca dari Korea Selatan, KONEPS, Sistem e-purcurement Nomor 1 Di Dunia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, Oktober-Desember 2011.